

2021




**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI PRATAMA PERENCANAAN
DESA / KELURAHAN TANGGUH -BENCANA
DAN KRISIS KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT**

Skema sertifikasi Ahli Pratama Perencanaan Desa / Kelurahan Tangguh dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat adalah skema sertifikasi KKNi / okupasi / klaster yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP PMI untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP PMI. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan pada : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP. 314/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Perumahan Swadaya Sub Bidang Pendampingan Masyarakat untuk Jabatan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) menjadi Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menjadi Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 401 Tahun 2014 tentang Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Prabencana dan Paskabencana dan Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 052/KEP/PP.PMI/VIII/2021 tentang Penetapan Paket Kompetensi Jabatan di Lingkungan Palang Merah Indonesia

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP PMI dan memastikan kompetensi pada kualifikasi / jabatan / pekerjaan Ahli Pratama Perencanaan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Disahkan tanggal : 25 Oktober 2021
Oleh :


Drs. Goenawan Permadi, MA
Ketua LSP PMI


Drs. Arifin Muhamad Hadi, M.Kes
Ketua Komite Skema LSP PMI

Nomor Dokumen : 015-F/APDT /LSP- PMI/X/2021
Nomor Salinan :
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Penanggulangan Bencana
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Penanggulangan Bencana yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Penanggulangan Bencana.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Penanggulangan Bencana..
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Ahli Pratama Perencanaan Desa / Kelurahan Tangguh dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Ahli Pratama Perencanaan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 314/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standart Kompetensi Kerja Nasional Sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Bidang Pemukiman Bidang Perumahan Swadaya Sub Bidang Pendampingan Masyarakat Untuk Jabatan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Menjadi Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,
- 4.5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menjadi Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 401 Tahun 2014 tentang Penetapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

- Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana,
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2018 tentang Penetapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Perencana dan Pascabencana,
 - 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
 - 4.9. Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 052/KEP/PP.PMI/VIII/2021 tentang Penetapan Paket Kompetensi Jabatan di Lingkungan Palang Merah Indonesia

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : Okupasi

5.2 Nama Skema : Ahli Pratama Perencanaan Desa / Kelurahan Tangguh dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	SJK.PM01.006.01	Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
2	TPM 0002.018.01	Mengembangkan metode, system kerja, arah kebijakan pendampingan Masyarakat <u>level Advisor</u>
3	0.84PBI01.012.01	Menyusun Rencana Penyediaan Sumber Daya
4	0.84PBI01.004.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Risiko Bencana
5	TPM.0002.007.01	Membuat dan Menggunakan Media Pendampingan Level Fasilitator.
6	SJK.PM02.003.01	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
7	TPM.0002.016.01	Mengevaluasi dampak Pelaksanaan Pendampingan TPMPS level Supervisor
8	0.84PBI01.003.01	Mengevaluasi Risiko Bencana Dalam Kondisi Bencana Belum Terjadi
9	SJK.PM03.002.01	Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu
10	O.842340.012.01	Memimpin Kerjasama Lintas Organisasi

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Pendidikan minimal Profesi/S2 / pendidikan sederajat atau berpengalaman dalam memimpin dan mengendalikan pendampingan Perencanaan Desa / Kelurahan Tangguh bencana dan krisis kesehatan berbasis masyarakat sedikitnya 7 kali kegiatan.
- 6.2. Telah memiliki sertifikat pelatihan dalam memfasilitasi proses perencanaan Desa/ Kelurahan Tangguh bencana / krisis kesehatan berbasis masyarakat.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Ahli Pratama Perencanaan Desa / Kelurahan Tangguh dan Krisis Kesehatan Berbasis Masyarakat diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (terlampir)

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
 - b. Salinan identitas diri (KTP/KK)
 - c. Salinan Ijazah pendidikan minimal Profesi/S2 / pendidikan sederajat atau salinan piagam/surat keterangan/surat tugas memimpin dan mengendalikan pendampingan Perencanaan

Desa / Kelurahan Tangguh bencana dan krisis kesehatan berbasis masyarakat sedikitnya 7 kali kegiatan

- d. Salinan sertifikat pelatihan dalam memfasilitasi proses perencanaan Desa/ Kelurahan Tangguh bencana / krisis kesehatan berbasis masyarakat.
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.
- 9.5.3. LSP Palang Merah Indonesia akan membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi bila:
 - a. Menyalahgunakan sertifikat.
 - b. Terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh negara dan dinyatakan status terhukum oleh pengadilan.
 - c. Tidak memelihara kompetensi teknis selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkan sertifikat kompetensi.
 - d. Meninggal dunia
- 9.5.4. LSP Palang Merah Indonesia membuat perjanjian mengikat dengan pemegang sertifikat bahwa:

- a. Selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- b. Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.